

TESIS

**ASPEK ETIKA HUKUM RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS
DI BADAN USAHA MILIK NEGARA OLEH PERWIRA TINGGI
TNI/POLRI YANG AKTIF**



OLEH :

RIZKI FIRMANSYAH

NIM. 031924153004

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

MINAT STUDI HUKUM PEMERINTAHAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS AIRLANGGA

SURABAYA

2022

**ASPEK ETIKA HUKUM RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI
BADAN USAHA MILIK NEGARA OLEH PERWIRA TINGGI
TNI/POLRI YANG AKTIF**

TESIS

Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum

Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum

Minat Studi Hukum Pemerintahan Pada Fakultas Hukum

Universitas Airlangga

Oleh :

RIZKI FIRMANSYAH

NIM. 031924153004

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

MINAT STUDI HUKUM PEMERINTAHAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS AIRLANGGA

SURABAYA

2022

LEMBAR PENGESAHAN

Tesis ini telah disetujui,

Tanggal Januari 2022

Oleh:

Pembimbing Pembimbing Utama :



Dr. Rr. Herini Siti Aisyah, S.H., M.H.

NIP. 196912251995122001

Dosen Pembimbing Kedua :



Dr. Bambang Suheryadi, S.H., M.Hum.

NIP. 196809281997021

Mengetahui:

Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Airlangga



Dr. Aktieva Tri Tjitrawati, S.H., M.Hum

NIP. 196401071989032001

**Tesis ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Panitia Penguji
Pada tanggal 18 Januari 2022**

PANITIA PENGUJI TESIS

Ketua : Dr. M. Hadi Shubhan, S.H., M.H., C.N.
Anggota : 1. Prof. Dr. Tatiek Sri Djatmiati, S.H., M.S.
2. Dr. Suparto Wijoyo, S.H., M.Hum.
3. Dr. Rr. Herini Siti Aisyah, S.H., M.H.
4. Bambang Suheryadi, S.H., M.Hum.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang Aspek Etika Hukum Rangkap Jabatan Sebagai Komisaris di Badan Usaha Milk Negara Oleh Perwira Tinggi TNI/POLRI yang Aktif sehingga nantinya diperoleh penjelasan bagaimana tinjauan yuridis terhadap TNI/POLRI yang Aktif yang merangkap jabatan tersebut. Penelitian ini disusun berdasarkan penelitian normative dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, Jenis bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini menunjukkan bahwa perspektif mengenai fenomena rangkap jabatan perlu untuk dilakukan guna memitigasi persoalan yang berlarut hanya akan menimbulkan kebingungan instansi/pejabat penyelenggara pemerintahan yang disinyalir melakukan rangkap jabatan yang selama ini sering diidentikkan dengan kerugian Negara.

Kata Kunci: BUMN, Rangkap Jabatan, TNI/Polri

ABSTRACT

Research aims to analyze the Legal Ethical Aspects of Concurrent Positions as Commissioner in BUMN by an Active TNI/POLRI High Officer so that later a juridical explanation is obtained against an Active TNI/POLRI who holds concurrent positions. This research was conducted based on normative research method with statute and conceptual approaches. The legal materials obtained involved primary, secondary, and tertiary materials. The research result concludes that the perspective over double positions is required to mitigate the sustainability of pros and cons. The continual issue will only create confusion and discomfort for the related government agencies/officials regarding double positions that are often seen to contribute to the state loss.

Keywords: Double positions, BUMN, TNI/POLRI

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala yang selalu memberikan rahmat, hidayah, dan taufik-Nya serta waktu dan kesempatan sehingga penulis dapat memenuhi salah satu kewajiban besar dalam hidup yaitu menyelesaikan tesis yang berjudul **“ASPEK ETIKA HUKUM RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI BADAN USAHA MILIK NEGARA OLEH PERWIRA TINGGI TNI/POLRI YANG AKTIF”**. Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan jenjang studi Strata Dua pada Prodi Magister Ilmu Hukum Universitas Airlangga. Selesaiannya tesis ini tidak terlepas dari doa, dukungan, dan kontribusi dari beberapa pihak. Maka dari itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua penulis, yaitu **Bapak Perija Wirawan, S.H** dan **Ibu Almarhumah Ibu Dyah Sri Maratani** atas doa, dukungan dan kasih sayang sekaligus kakak penulis yaitu **Masjoko, R.Imron Amin, S.H., M.H. Cyntia Pratitis Widyarachma dan Reza Teguh Wibowo** yang telah memberikan dukungan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tesis ini dengan lancar;
2. **Bapak Prof. Dr. H. Mohammad Nasih, S.E M.T., Ak** selaku Rektor Universitas Airlangga beserta seluruh jajaran wakil rektor;
3. **Bapak Imam Prihandono, S.H., M.H., LL.M., Ph.D.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, **Ibu Dr. Enny Narwati, SH., MH., Bapak Dr. Mohammad Syaiful Aris, SH., MH., LL.M.** dan **Bapak Maradona, SH., LL.M., Ph.D.**, selaku jajaran wakil dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
4. **Ibu Dr. Aktieva Tri Tjitrawati, S.H., M.Hum** selaku Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum dan **Ibu Rizki Amalia, S.H., M.H.** selaku Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Airlangga;
5. **Dr. Rr. Herini Siti Aisyah, S.H., M.H.** dan **Dr. Bambang Suheryadi, S.H., M.Hum.** sebagai pembimbing penulis, dan terimakasih atas saran, bimbingan,

dan ilmu yang diberikan sehingga penulis dapat terbantu dalam penyelesaian tesis ini;

6. **Prof. Dr. Tatiek Sri Djatmiati, S.H., M.S. Dr. Suparto Wijoyo, S.H., M.Hum. Dr. Rr. Herini Siti Aisyah, S.H., M.H. Bambang Suheryadi, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Penguji dan Dosen MKPT. Penulis ucapkan terimakasih atas saran, masukan, dan ilmu yang telah diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini;
7. **Bapak Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki, S.H., M.S., LL.M., Ibu Prof. Dr. Tatiek Sri Djatmiati, S.H., M.S., Bapak Prof. Dr. Nur Basuki Minarno, S.H., H.Hum., Bapak Prof. Dr. Yohanes Sogar Simamora, S.H., M.Hum, Bapak Dr. Sukardi, S.H., M.H., Bapak Dr. Emanueal Sujatmoko, S.H., M.S., Ibu Dr. Lanny Ramli, S.H., M.Hum, Ibu Dr. Lilik Pudjiastuti, S.H., M.H., Ibu Dr. Sri Winarsi, S.H., M.H., Ibu Dr. RR. Herini Siti Aisyah, S.H., M.H., Bapak Dr. Mohammad Sumedi, S.H., M.H., Bapak Dr. Herlambang Perdana Wiratraman, S.H., M.A., Bapak Dr. Radian Salman, S.H., LL.M., Bapak Iman Prihandono, S.H., M.H., LL.M., Ph.D., Bapak Faizal Kurniawan, S.H., M.H., LL.M., Bapak Taufik Rachman, S.H., LL.M., Ph.D** serta jajaran dosen-dosen lainnya yang terlibat maupun tidak terlibat langsung di dalam perkuliahaan pada Program Studi Magister Ilmu Hukum. Semoga ilmu-ilmu yang telah dicurahkan dapat bermanfaat bagi Penulis serta terlebih bermanfaat bagi orang lain;
8. **Ibu Dr. RR. Herini Siti Aisyah, S.H., M.H.,** wanita terbaik yang telah sabar memberikan dukungan, masukan serta senantiasa mengingatkan terhadap penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan lancar;
9. Rekan-rekan Penulis (**Nurvijay Aldi Darmawan, Abdan Ramadhani, Andri Suryo Prayogo, Jessi Dwi Suda**) yang telah memberikan masukan serta dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan lancar;

Tesis ini mungkin jauh dari kata sempurna dan penulis menyadari bahwa banyak keterbatasan dalam penyusunannya. Oleh karena itu, segala bentuk saran ataupun masukan yang bersifat membangun sangat diharapkan demi kesempurnaan

tesis ini. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi setiap pembacanya, terutama bagi penulis serta dapat menjadi acuan dan inspirasi bagi semua pihak terlebih untuk kepentingan penelitian selanjutnya.

Surabaya, 18 Januari 2022



Rizki Firmansyah, S.H.,

PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS

Yang bertanda tangan dibawah ini saya :

Nama : Rizki Firmansyah

NIM : 031924153004

Alamat/No. Tlp : Perum RJ A Kalibata C6-257 / 087750798935

dengan ini menyatakan bahwa :

1. Tesis saya ini adalah asli dan benar-benar hasil karya saya sendiri, dan bukan hasil karya orang lain dengan mengatas namakan saya, serta bukan merupakan hasil peniruan atau penjiplakan (plagiarism) dari hasil karya orang lain. Tesis ini belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di Universitas Airlangga, maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Dalam tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar kepustakaan.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis Tesis ini, serta sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan norma pengaturan yang berlaku di Universitas Airlangga.

Surabaya, 18 Januari 2022

Yang membuat pernyataan,



Rizki Firmansyah
NIM. 031924153004

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2005 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki Jabatan Rangkap
- Peraturan Pemerintah Nomor. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor. 28 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota TNI
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2019 tentang Perubahan Keduabelas atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Polri.
- Peraturan Presiden No. 102 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan TNI
- Peraturan Presiden No. 103 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Polri
- Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PER-02/MBU/02/2015 tentang tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN.
- Peraturan Menteri Pertahanan No. 33 Tahun 2017 tentang Penghasilan Prajurit TNI di Lingkungan Kemhan dan TNI.

DAFTAR TABEL

Tabel	1.1 Anggota TNI/Polri Aktif sebagai Komisaris BUMN.....	2
Tabel	1.2 Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	6

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS.....	x
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii

BAB I PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang Permasalahan dan Rumusan.....	1
2. Rumusan Masalah.....	7
3. Tujuan Penelitian	8
4. Manfaat Penelitian	8
5. Tinjauan Pustaka	9
6. Metode Penelitian.....	17
a. Tipe Penelitian	17
b. Pendekatan Masalah	18
c. Sumber Bahan Hukum	19
d. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	21
e. Analisis Bahan Hukum	22
7. Sistematika Penulisan	23
BAB II ASPEK YURIDIS BAGI PERWIRA TNI/POLRI AKTIF SEBAGAI KOMISARIS BADAN USAHA MILIK NEGARA.	25

1. TNI/Pori dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia	25
2. Problematika TNI/Polri Sebagai Komisaris BUMN.....	33
BAB III KONSEKUENSI YURIDIS DAN ETIK PERWIRA TNI/POLRI	
AKTIF SEBAGAI KOMISARIS BADAN USAHA MILIK NEGARA.....	46
1. Rangkap Jabatan Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.....	46
2. Rangkap Jabatan TNI/Polri Menurut Hukum dan Etika.....	49
3. Konsekuensi Rangkap Jabatan TNI/Polri	62
BAB IV PENUTUP	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran-saran.....	71
DAFTAR BACAAN.....	71

**ASPEK ETIKA HUKUM RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI
BADAN USAHA MILIK NEGARA OLEH PERWIRA TINGGI
TNI/POLRI YANG AKTIF**



OLEH :

RIZKI FIRMANSYAH, S.H

NIM. 031924153004

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
MINAT STUDI HUKUM PEMERINTAHAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2022**